Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT I

TAHUN 2022

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

JAKARTA, 31 Januari 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah dilakukan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2022.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat I atas penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat I untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I dengan baik, serta semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor industri.

Jakarta, 31 Januari 2023

Inspektur I

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Bayu Fajar Nugroho

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI 1
DAFTAR BAGAN 2
RINGKASAN EKSEKUTIF 3
BAB I 6
PENDAHULUAN 6
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 6
B. PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT I 6
C. STRUKTUR ORGANISASI 7
BAB II 8
RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN 8
A. RENCANA STRATEGIS 8
B. KEBIJAKAN PENGAWASAN 2022 (*DEKLARASI YOGYA*) 19
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023 21
D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA 21
E. RENCANA ANGGARAN 24
BAB III 31
AKUNTABILITAS KINERJA 31
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 31
1. Analisis Capaian Kinerja Organisasi 31
2. Analisis Capaian Sasaran KInerja 31
3. Capaian Rencana Aksi 2021 42
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 48
BAB IV 51
PENUTUP 51
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN 51
B. PERMASALAHAN/KENDALA 52
C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN 52
LAMPIRAN - LAMPIRAN 53

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Peta SDM Inspektorat I 6
Bagan 2. Matrik Indikator Tujuan 9
Bagan 3. Matrik Renstra Inspektorat I 17
Bagan 4. Perspektif Perjanjian Kinerja 22
Bagan 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2022 23
Bagan 6. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2022 24
Bagan 7. Revisi Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2022 (revisi 11) 25
Bagan 8. Rencana Aksi Tahun 2022 19
Bagan 9. Realisasi Indikator Tujuan 32
Bagan 10. Perbandingan Level MRI 32
Bagan 11. Realisasi Sasaran Strategis 40
Bagan 12. Realisasi Sasaran Strategis 41
Bagan 13. Capaian Rencana Aksi 42
Bagan 14. Capaian Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan 44
Bagan 15. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 48
Bagan 16. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39 49
Bagan 17. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022 sesuai Aplikasi PP39 49
Bagan 18. Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2022 dan 2021 50
Bagan 19. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 51

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi urusan keuangan dan barang milik negara kementerian, pengelolaan dan pengendalian risiko, serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam mengemban tugas tersebut Inspektorat I menetapkan visi sesuai Rencana Strategis Tahun 2022-2024 yaitu mendukung Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaan tugas pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan dan BMN untuk menghasilkan Pengelola Keuangan dan BMN yang berintegritas, andal, dan professional dengan misi meningkatkan kualitas layanan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan yang transparan, dan meningkatkan kualitas layanan pelaporan keuangan dan BMN yang akuntabel Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 serta kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis capaian perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan kepada Inspektur Jenderal serta kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat I.

Kinerja Inspektorat I tahun 2022 antara lain :

a. Realisasi Anggaran

Pagu DIPA	: Rp. 1.983.753.000,-
Realisasi	: Rp 1.983.519.970,-
Persentase	: 99,99%
Sisa Anggaran	: Rp 233.030,-

b. Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal, diperoleh melalui kegiatan pengolahan *Data dan Informasi terkait temuan material berdasarkan pengawasan eksternal.* Cara pengukuran Indikator ini dengan *Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,30% total anggaran Kementerian Perindustrian khususnya cakupan tugas Inspektorat I.* Realisasi batas toleransi material di tahun 2023 adalah sebesar 0,05%;

c. Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti. Kegiatan yang dilakukan adalah Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum. Target yang ditetapkan sebesar 90%. Cara pengukuran Indikator ini adalah Persentase Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas. Pengaduan yang berkadar pengawasan Bulan Januari-Desember 2022, Jumlah Pengaduan yang berkadar pengawasan sebanyak 2 kali pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Selama Tahun 2022, telah dilakukan penanganan pengaduan masyarakat sejumlah 208 aduan;

d. Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi. Target yang ditetapkan sebesar 92%. Cara pengukuran Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi. Data rekomendasi yang digunakan adalah rekomendasi hasil pengawasan tahun sebelumnya (T-1). Realisasi Indikator ini yang dihitung selama tahun 2021 mencapai 86,52%, tidak mencapai target yang ditetapkan;

e. Indikator Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) dengan target yang ditetapkan sebesar level 3. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemetaan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian. Cara pengukuran indikator ini adalah Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian TA 2021-2022 dengan Nota Dinas 716/IJ-IND.1/PW/IX/2022, hasil penjaminan kualitas dapat disimpulkan bahwa nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,063, Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) sebesar 2,85 dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 3,65;

f. Indikator Tingkat kepuasan pelanggan cakupan tugas Inspektorat I dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Cara pengukuran indikator ini adalah Dilakukan melalui survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal, dalam hal ini auditi. Langkah pengukuran data mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik. Dari perhitungan yang dilakukan 65 responden (auditi), diperoleh bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan Inspektorat I sebesar 87,5% dengan kategori kinerja unit pelayanan Baik dan mutu pelayanan B;

g. Indikator Penerapan TABK (Teknik Audit Berbantuan Komputer) dengan target yang ditetapkan sebesar 78%. Cara pengukuran indikator ini adalah 'Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit dengan indicator

- Pada Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling
- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor
- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)
- Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan
- Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)
- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data
- Tahap Pelaporan menggunakan Office

h. Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Kegiatan penunjang indikator ini adalah pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja dan Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Sekretariat Inspektorat Jenderal. Realisasi yang diperoleh selama tahun 2022 sebesar 92,15% melebihi target yang ditetapkan;

i. Indikator Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT yang ditetapkan sebesar 90% dengan Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.;

j. Indikator Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya yang ditetapkan sebesar 100% dengan cara penghitungan Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki;

Dengan disusunnya LAKIP Inspektorat I tahun 2022 ini, diharapkan dapat disajikan langkah dan upaya Inspektorat I dalam mencapai sasaran kinerja tahun 2023, yang merupakan target jangka menengah pelaksanaan Renstra Inspektorat I tahun 2022-2024 dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta menjadi masukan dan umpan balik bagi peningkatan kinerja Inspektorat I dalam menunjang peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perindustrian dalam mengawal pembangunan sektor industri di Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

B. PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT I

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis pengawasan internal cakupan Inspektorat I dalam rangka pembangunan industri adalah

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian dan Isu Strategis Pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas; dan
5. Menerapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat I melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat, Unit Vertikal, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat I juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit Satker Pusat dan Vertikal yang menjadi cakupan tugas, serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK Nomor 196 tahun 2015.

Pada tahun 2022 Inspektorat I juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat I agar penerapan kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai peraturan berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksa naan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat I melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) yaitu **Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).**

Agar pelaksanaan pengawasan dapat terselenggara dengan optimal, Inspektorat I melakukan **Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi,** berupa pengawalan/pendampingan dan pengawasan kinerja serta pendampingan implementasi manajemen risiko. Dalam kondisi pandemi Covid 19, Inspektorat I melakukan pengawalan pelaksanaan program percepatan penanganan Covid 19.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat I melaksanakan kegiatan **Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan**.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

- Inspektur
- Subbagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor yang berkompeten yang ditunjuk oleh Inspektur.

Struktur Organisasi Inspektorat I

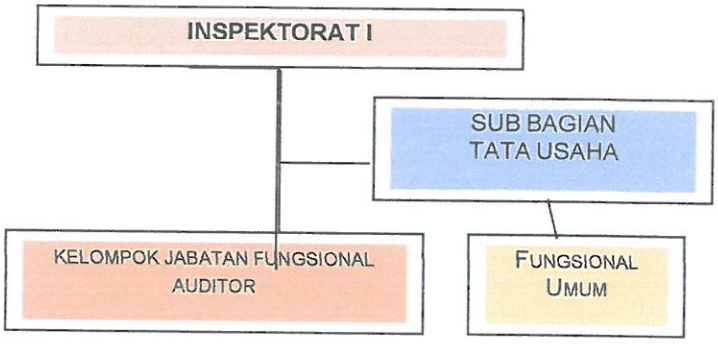

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2022 sebanyak 19 orang. Jumlah tersebut terdiri atas pejabat structural 2 orang, auditor sebanyak 15 orang, fungsional umum 1 orang, dan 1 orang pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPM). Berdasarkan analisis beban kerja dan penghitungan gugus tugas, jumlah auditor tersebut belum memadai karena belum memenuhi jumlah ideal sebagaimana tergambar dalam table berikut:

Bagan 1. Peta SDM Inspektorat I

No.	Jumlah SDM APIP	Kondisi saat ini	Jumlah Ideal Sesuai Kebutuhan
1)	SDM Pengawasan		
a.	Jabatan Struktural	2	2
b.	Jabatan Fungsional Auditor	15	36
c.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-
d.	Pegawai Pelaksana Pengawasan bukan Auditor	1	1
2)	SDM Penunjang (ketatausahaan)		
a.	Jabatan Fungsional tertentu	-	2
b.	Jabatan Fungsional Umum	1	3
Jumlah		19	44

3. Cakupan Tugas

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2019, Inspektorat I memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit terdiri dari 2 satker Pusat dan 26 satker vertikal meliputi:

a. Unit Pusat (2 satker) yaitu:
   1) Sekretariat Jenderal;
   2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

b. Unit Vertikal Politeknik (12 satker), SMK (9 satker) dan BDI (7 satker), yaitu:
   1) Politeknik STMI Jakarta;
   2) Politeknik STTT Bandung;
   3) Politeknik AKA Bogor;
   4) Politeknik PTKI Medan;
   5) Politeknik ATI Padang;
   6) Politeknik ATK Yogyakarta;

7) Politeknik APP Jakarta;
8) Politeknik ATI Makassar;
9) Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
10) Politeknik Industri Logam Morowali;
11) Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal;
12) Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;
13) Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Bogor;
14) Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Padang;
15) Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Makassar;
16) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Banda Aceh;
17) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Makassar;
18) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Yogyakarta;
19) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Bandar Lampung;
20) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang;
21) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak;
22) Balai Diklat Industri Medan;
23) Balai Diklat Industri Padang;
24) Balai Diklat Industri Jakarta;
25) Balai Diklat Industri Yogyakarta;
26) Balai Diklat Industri Surabaya;
27) Balai Diklat Industri Makassar;
28) Balai Diklat Industri Denpasar.

4. Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang sedang dihadapi Inspektorat I

Inspektorat I diharapkan dapat memberikan pengawalan yang optimal terhadap pembangunan infrastruktur CORPU dan pengawalan terhadap akuntabilitas pembangunan sarana dan prasarana yang sedang dilaksanakan oleh BPSDMI dan secretariat Jenderal. Inspektorat I diharapkan mampu memberikan pandangan dan rekomendasi kepada pimpinan untuk dapat memberikan keputusan yang sebaik-baiknya.

BAB II
RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam sektor industri adalah mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilaitambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industrie sehingga dapat bersaing dengan negara majul ainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelol asumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal tercapainya visi Presiden dan Wakil Presiden di sektor industri secara efektif, efisien sert aakuntabel melalui aktivitas quality assurance, consulting partner, serta anti corruption activity.

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu "Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional" yang bercirikan:

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadaiatasketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat I adalah sebagai berikut :

Bagan 2. Matrik Indikator Tujuan

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2022	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Mendukung tercapainya tata kelola pemerintah yang baik	Tj.1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. yang merupakan turunan (cascading) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

1. Batas toleransi temuan eksternal sebesar 1% pada tahun 2024;
2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (IKU) sebesar 2% pada tahun 2024;
3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% pada tahun 2024;
4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU) sebesar 93% pada tahun 2024;
5. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Index berada pada level 4 di tahun 2024;
6. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan sebesar 85% pada tahun 2024;
7. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) sebesar 85% pada tahun 2024;
8. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT sebesar 100% pada tahun 2024;
9. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya sebesar 100% pada tahun 2024.

Adapun peta strategi Inspektorat Jenderal dilihat dari perspektif pemangku kepentingan, proses internal serta pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut:

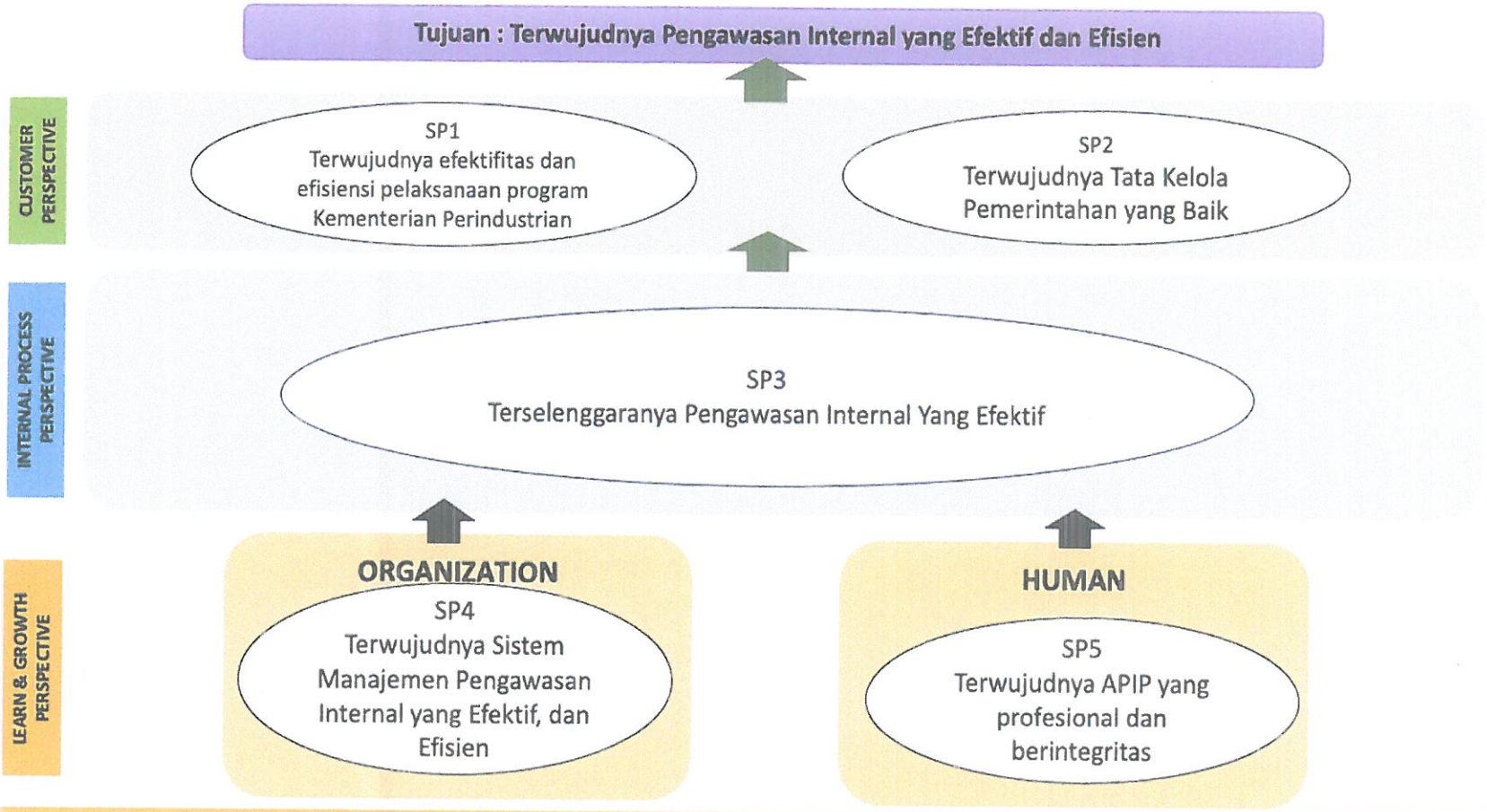

Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan peta strategis pengawasan yang dilakukan Inspektorat I dapat dijabarkan sebagai berikut

Bagan 3. Matrik Renstra Inspektorat I

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Cara Pengukuran
Stakeholders Perspective										
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU (target tetap)	Persen	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,00%	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai temuan dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,3% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2021
		2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		3	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	Persen	91%	91,5%	92% (86,52%)	92,00%	92,20%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi (T-1), Misal: Penyusunan laporan kinerja tahun 2021, maka data yang digunakan adalah data audit yang dilakukan ditahun Januari-Desember tahun 2020
		2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level	Level 3	Level 3	Level 3 (2,85)	-	-	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP (jika memungkinkan,dilakukan usulan revisi target berdasarkan range level 3 ke Biro Perencanaan)
				Indeks	-	-	-	2,89	2,92	

Internal Process Perspective										
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	Belum ada	70%	80%	80%	85%	Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIPI. Pada tahun 2022, kuesioner akan disebarkan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
		2	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	76%	77%	78%	79%	80%	Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan **Audit** - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) **pemberian akses ke seluruh auditor*- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)**Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan*-Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data- Tahap Pelaporan menggunakan *Office*
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	3	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	Belum ada	75%	80%	85%	90%	R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN. $TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun. $TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

Learn & Growth Perspective										
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	70%	80%	90%	100%	100%	Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80%	90%	100%	100%	100%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki

B. KEBIJAKAN PENGAWASAN 2022 (*DEKLARASI YOGYA*)

1. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian Tahun 2021 adalah: **"Tercapainya Target Kementerian Perindustrian Sesuai RIPIN, RPJMN, serta Rencana Strategis"**

2. SASARAN KEBIJAKAN

Sasaran Kebijakan Pengawasan Internal 2022 berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

a. Pengawasan P3DN;
b. Pengawasan kinerja dan kegiatan beresiko tinggi;
c. Monitoring dan evaluasi kebijakan sector industri;
d. Konsultiasi implementasi manajemen resiko; dan
e. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Perindustrian yang efektif, efisien, ekonomis dan taat peraturan, maka kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu:

1. Pengawasan Prefentif

Pengawasan prefentif merupakan Pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (Assurance) maupun pemberian jasa konsultansi (Consulting). Pengawasan prefentif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2021 yang termasuk ke dalam pengawasan prefentif ini adalah:

a. Kegiatan Pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori)
   1) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L);
   2) Reviu Laporan Keuangan (LK)/Barang Milik Negara (BMN)/ Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
   3) Pengendalian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);
   4) Monitoring Penyerapan Anggaran.
b. Kegiatan Pengawasan Non Madatori
   1) Pengawalan Prioritas;
   2) Consulting Manajemen Risiko;
   3) Kajian Isu Aktual;
   4) Pendampingan Pemeriksaan Eksternal.

2. Pengawasan Detektif

Pengawasan detektif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran melalui penjaminan mutu (Assurance).

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2021 yang termasuk ke dalam pengawasan detektif ini adalah:

a. Kegiatan Pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori):
   1) Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan (Zona Integritas, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
   2) Penilaian Index Manajemen Risiko (MRI);
   3) Pengawasan Kegiatan Konkuren;
b. Kegiatan Pengawasan Non Madatori
   1) Audit Kinerja maupun Audit Khusus;
   2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kebijakan bidang perindustrian;
   3) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP).

Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian akan dilakukan sejak tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, maupun tahap pelaporan/paska pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pengawasan baik yang bersifat prefentif maupun detektif.

Pelaksanaan pengawasan internal pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian sebagai penjamin mutu (Assurance) maupun mitra konsultasi (Consulting Partner). Sedangkan pada tahap pelaporan/paska pelaksanaan kegiatan, pengawasan dilakukan melalui peran APIP sebagai penjamin mutu (Assurance).

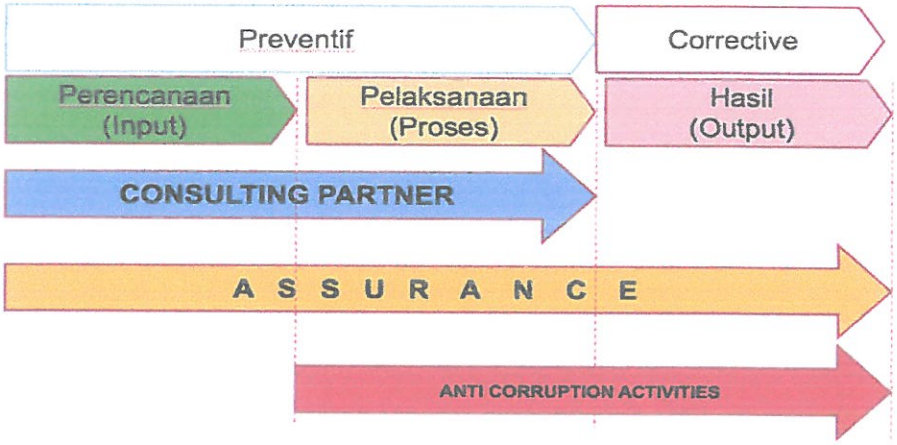

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan internal yang efesien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat I menetapkan kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Tema pengawasan (Audit)
   a) Audit terhadap penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten;
   b) Audit efektivitas pelaksanaan program prioritas dan industri 4.0;
2. Tema Monitoring dan Evaluasi (Monev), yaitu:
   a) Evaluasi Pengembangan SDM Industri;
3. Mandatori
   a) Audit kinerja
   b) Reviu LK/BMN dan PIPK
   c) Reviu RKA dan RK BMN
   d) Penilaian SAKIP
4. Pengawalan
   a) Pengawalan Manajemen Resiko
   b) Pengawalan Program Prioritas

D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka pada tahun 2022 disusun perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan perjanjian kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022:

Bagan 4. Perspektif Perjanjian Kinerja

Perubahan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Dari sisi Perspektif	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan
Dari sisi Sasaran Strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 1 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis
Dari sisi Indikator Kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 16 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 18 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 15 indikator kinerja

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa pada tahun 2022, Inspektorat I membagi seluruh substansi kerja sebagaimana tugas dan fungsi di lingkungan Ispektorat I ke dalam indikator kinerja yang rinci sehingga memudahkan dalam mendistribusikan ke penanggung jawab kegiatan.

Perjanjian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022
Stakeholders Perspective					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU (target tetap)	Persen	1,30%
		2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	90%
		3	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	Persen	92%
		4	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level	Level 3 (2,85)
				Indeks	-
Internal Process Perspective					
2	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	80%
		2	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	78%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	3	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	80%
Learn & Growth Perspective					
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	90%
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	100%

Bagan 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2022

E. RENCANA ANGGARAN

Sesuai dengan DIPA tahun 2022, program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal adalah "Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian".

Masing-masing Unit Kerja Eselon II mempunyai 1 (satu) kegiatan. Adapun kegiatan Inspektorat I adalah "Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat I" dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.108.753.000,- dan pagu akhir Rp. 1.983.753.000,-

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	VOLUME	PAGU
WA	Program Dukungan Manajemen		2.108.753.000
1841	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat I		2.108.753.000
1841.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		50.000.000
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran		22.700.000
51	*Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran*		*22.700.000*
A	Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran		22.700.000
953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi		27.300.000
51	*Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Inspektorat I*		*27.300.000*
A	Penyusunan Evaluasi Triwulanan Dan Tahunan		27.300.000
1841.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2.058.753.000
965	Layanan Audit Internal		2.058.753.000
51	*Audit Program Dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I*		*1.058.747.000*
A	Pelaksanaan Audit Kinerja		1.048.287.000
B	Pelaksanaan Audit Khusus		10.460.000
52	*Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I*		*282.000.000*
A	Pelaksanaan Reviu Pipk Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		35.000.000
B	Pelaksanaan Reviu Lk/bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		153.000.000
C	Pelaksanaan Reviu Rkakl Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		65.000.000
D	Pelaksanaan Reviu Rkbmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		29.000.000
53	*Monitoring Dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I*		*73.000.000*
A	Pelaksanaan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		73.000.000
54	*Konsulting Dan Pengawaian Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I*		*645.006.000*
A	Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		263.988.000
B	Pembinaan Dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		142.862.000
C	Sosialisasi/pendampingan Implementasi Spip Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I		238.156.000
	TOTAL		2.108.753.000

Bagan 6. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2022

Jenis Kegiatan		PAGU Anggaran
1	Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	968.002.000
2	Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	267.570.000
3	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	172.829.000
4	Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	534.432.000
5	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	16.220.000
6	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24.700.000
Total		1.983.753.000

Bagan 7. Revisi Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2022 (revisi 11)

Dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, tugas pokok dan fungsi tersebut pada awal tahun 2022 Inspektorat I mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.108.753.000,-. Namun demikian, dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran, terjadi perubahan alokasi anggaran menjadi Rp. 1.983.753.000,- pada Triwulan IV dengan rincian per program/kegiatan sebagai berikut:

1. Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I sebesar Rp 982.002.000,-.
2. Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I sebesar Rp. 267.570.000,-.
3. Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I sebesar Rp. 172.829.000,-.
4. Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I sebesar Rp534.432.000,-.
5. Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I sebesar Rp. 16.220.000,-.
6. Evaluasi Kegiatan Inspektorat I sebesar Rp. 24.700.000,-.

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dapat dicapai melalui rencana aksi sebagai berkut:

Bagan 8. Rencana Aksi Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN												
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I				1,3%	1. Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I 2. Reviu Laporan keuangan dan BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		Rp. 982.002.000,- Rp. 267.570.000,-	16,73% 58,49%	50,18% 38,99%	23,00% -	10,09% 2,52%
	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti				90%	prosedur		-	-	-	-	-
	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU				92%	prosedur		-	-	-	-	-
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I				indeks	Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program Kegiatan Cakupan Tugas Inspektorat I		Rp. 486.167.000,-	32,67%	32,67%	32,67%	1,99%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL												
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan				80%	Prosedur		-	-	-	-	-
	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)				78%	Prosedur		-	-	-	-	-
Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU				80%	Pengadaan barang						
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN												
Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat keseuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT				80%	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I		Rp. 32.070.000,-	24,95%	24,95%	25,18%	24,92%
	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya				100%	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I		Rp. 8.320.000,-	28,25%	28,25%	28,25%	15.25%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur I kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat I Kementerian Perindustrian pada tahun 2019. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat I dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat I. Pada pengukuran kinerja diuraikan pula secara sistematis mengenai penetapan indikator kinerja, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pemenuhan indikator kinerja tersebut.

Indikator kinerja Inspektorat I dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja yaitu:

1. **Indikator Masukan (*Input*)**: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. **Indikator Keluaran (*Output*)**: sesuatu bentuk produk/jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Hasil (*Outcome*)**: sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan.
4. **Indikator manfaat (*Benefit*)**: sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. **Indikator dampak (*Impact*)**: ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Untuk tingkat eselon II, indikator kerja yang dihasilkan dicapai sampai indikator keluaran (Output) yang mengacu pada eselon I yaitu capaian indikator hasil (Outcome).

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Inspektorat I telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Dengan merujuk kepada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Inspektorst I Jenderal menyusun dokumen-dokumen tersebut di atas yang akan dijabarkan kemudian. Adapun rincian analisis

capaian masing-masing sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dapat diuraikan sebagai berikut:

Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat I untuk mewujudkan tata kelola keuangan Kementerian Perindustrian yang baik dan benar, maka dilakukan kegiatan pengawasan internal pada cakupan tugas Inspektorat I yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Adapun sasaran strategis yang telah dicapai oleh Inspektorat I adalah sebagai berikut:

Kode Tujuan	Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2022	
					Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tj.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Tj.1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level	3	3

Bagan 9. Realisasi Indikator Tujuan

Indikator ini ditahun sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP. Dalam penilaian terhadap manajemen resiko tahun 2022 masih merupakan tahap ujicoba pedoman baru bekerjasama dengan BPKP sehingga masih terdapat indicator-indikator penilaian yang masih perlu didiskusikan sehingga memperoleh hasil maksimal yang sebenarnya.

Berdasarkan dokumen RPJMN 2022-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022, pada tanggal 27 Januari 2022 dapat dilihat pada tabel perbandingan indikator kinerja tujuan 1.2 "Indeks Penerapan Manajemen Risiko" atau lebih dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen RPJMN. Perbandingannya pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

Tahun	K/L		
	Pertanian	Perindustrian	Pertanian
2018	3.037	Level 3	3.462
2019	3.112	3.477	3.507
2021	Belum Ada Data	2,77	Belum Ada Data
2022	Belum Ada Data	2,85	Belum Ada Data

Bagan 10. Perbandingan Level MRI

Data diatas menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian menurut pedoman penilaian yang baru belum dapat mencapai level 3, namun hal ini dapat disebabkan karena perbedaan bobot nilai terhadap unsur-unsur penilaian sehingga mengakibatkan perbedaan nilai dengan metode sebelumnya.

2. Analisis Capaian Sasaran Kinerja

a) Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN												
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I				1,3%	1. Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I 2. Reviu Laporan keuangan dan BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		**Rp. 982.002.000,-** Rp. 267.570.000,-	16,73% 58,49%	50,18% 38,99%	23,00% -	10,09% 2,52%

	IKU	Target	Realisasi
Pada Inspektorat I, kegiatan reviu dilakukan terhadap Laporan Keuangan dan BMN semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2021 pada 28 satker cakupan tugas Inspektorat I yang terdiri dari 2 unit Pusat yaitu; Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), serta 28 unit vertikal yaitu Politeknik, SMK dan BDI kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan, dan segala koreksi dapat dipebaiki pada saat reviu berlangsung, sehingga indikator kinerja ini dapat mencapai 100%, termasuk kategori sangat baik. Bila dibanding dengan tahun 2018, capaian kinerja Inspektorat I tetap sama yaitu 100%, sangat baik, sedangkan pada tahun 2017 indikator ini belum ada, sehingga belum dapat dianalisa sebagai perbandingan.		1,3%	0,005%

BPK telah Me-release hasil pemeriksaan pada tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana Laporan Nomor 7b/LHP/XV/05/2021 sbg berikut:
Realisasi Anggaran Kemenperin TA 2022: Rp 1.385.216.826.953,-
Temuan BPK: Rp 729.039.198,12
maka, batas toleransi temuan= temuan BPK /realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2022 jadi, batas toleransi temuan material: **0.05%**
telah mencapai target

$$x \leq 1{,}3\%$$

dimana

$$x = \frac{\Delta mt}{\Delta aa} \text{ X } 100\%$$

x	:	batas maksimum
Δmt	:	Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan cakupan Inspektorat I yang bernilai uang
Δaa	:	total realisasi anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I

TEMUAN MATERIAL BPK PEMERIKSAAN TAHUN 2021			
		TEMUAN MATERIAL	TOTAL REALISASI
BPSDMI	:	729.039.198,12	1.080.724.431.321,-
SETJEN	:	-	304.492.395.632,-

Capaian 5 tahun terakhir	2017	2018	2019	2020	2021
	0,003%	**0,188%**	**0,094%**	**0,003%**	**0,003%**

b) Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN												
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti				90%			-	-	-	-	100%

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat pengaduan yang berkadar pengawasan pada cakupan tugas Inspektorat I	IK	TARGET	REALISASI
		90%	111,11%

Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas

Periode 1 Januari s/d 30 April 2022, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 108 (Seratus delapan) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang yang terdiri dari 106 (serratus enam) kali merupakan pengaduan tidak berkadar pengawasan dan 2 (dua) kali berkadar pengawasan terkait masalah kepegawaian. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;

Periode 1 Mei s/d 30 Agustus 2022, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 48 (Empat Puluh Delapan) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruh nya bersifat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;

Periode 1 September s/d 31 Desember 2022, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 52 (Lima Puluh Dua) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruh nya bersifat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti.

Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022, realisasi Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% karena seluruh pengaduan berkadar pengawasan telah selesai ditindaklanjuti. Capaian Indikator ini sebesar 111,11%. Keberhasilan indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dapat memenuhi target dikarenakan jumlah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk hanya sedikit dan langsung ditindaklanjuti untuk diselesaikan. Hal itu berarti kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah baik.

Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun

$x \geq 90\%$

dimana

$$x = \frac{\Delta AT}{\Delta AM}$$

$x \geq 90\%$

dimana

$$x = \frac{\Delta AT}{\Delta AM}$$

x	:	batas maksimum
ΔAT	:	**Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi**
ΔAM	:	**Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem**

REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021

		Pengawasan	Non Pengawasan
BPSDMI	:	2	48
SETJEN	:	-	52
		2	104

Capaian 5 tahun terakhir	2018	2019	2020	2021	2022
	100%	100%	100%	100%	100%

c) Capaian Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN												
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU				92%	-		-	-	-	-	84,49%

	IKU	TARGET	REALISASI
Kegiatan ini berkoordinasi dengan bagian Tindak Lanjut, Sekretariat Inspektorat Jenderal. Indikator kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2019. Penyelesaian kegiatan ini agak berbeda dari tahun sebelumnya, disini masing-masing satker harus menyelesaikan tindak lanjutnya dilihat dari segi program, jadi tidak hanya membuat surat teguran atau pernyataan saja. Hal ini perlu waktu dan penyesuaian dari satker untuk penyelesaian saran/rekomendasi hasil pengawasan tersebut. Realisasi indikator ini sebesar 72% dari total satker cakupan tugas Inspektorat I, sehingga belum dapat mencapai target pada Perjanjian Kinerja tahun 2019. Pencapaian ini dilakukan dari batas waktu yang diberikan oleh masing-masing satker cakupan tugas untuk menyelesaikan tindak lanjut saran/rekomendasi, namun masih terdapat satker yang belum dapat menyelesaikan.		92%	84,49%

Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2022. Dari total rekomendasi sebanyak 673, data yang ditindaklanjuti sebanyak 631. Sesuai rekomendasi 521 dan belum sesuai rekomendasi sebanyak. Capaian rekomendasi sebesar 631/673*100% = 93,76

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satuan kerja dibagi dengan jumlah total rekomendasi

$x \geq 92\%$

dimana

$x = \frac{\Delta RAHP}{\Delta RHP} \times 100\%$

$x \geq 92\%$

dimana

$x = \frac{207}{245} \times 100\%$

$= 84{,}49\%$

x	:	batas maksimum
$\Delta RAHP$	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi
ΔRHP	:	total rekomendasi hasil pengawasan

REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021					
		SR	BSR	B	TPTD
BPSDMI	:	167	5	24	0
SETJEN	:	34	1	14	0
	245	201	6	38	0

Capaian 5 tahun terakhir	2018	2019	2020	2021	2022
	88%	93%	88%	71%	84,49%

d) Capaian Indikator Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN												
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I				indeks	Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program Kegiatan Cakupan Tugas Inspektorat I		Rp. 534.432.000,-				INDEKS

Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	TARGET	REALISASI
		Indeks	indeks

berdasarkan hasil penilaian mandiri dan Quality Assurance oleh Tim Quality Assurance mencapai **2,62, namun satuan kerja cakupan Inspektorat I belum dilaksanakan penjaminan kualitas karena masih penyamaan persepsi terkait pedoman penilaian MRI, sehingga penilaian masih berdasarkan penilaian SPIP**

Terdapat perubahan mekanisme yang menyebabkan penghitungan tidak dapat di jabarkan melalui cakupan tugasnya namun dapat diperhitungkan melalui capaian MRI untuk level Kementerian yang menggambarkan pencapaian manajemen resiko dilingkungan unit dibawahnya.

Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP (jika memungkinkan,dilakukan usulan revisi target berdasarkan range level 3 ke Biro Perencanaan)

Capaian 5 tahun terakhir	2018	2019	2020	2021	2022
	Belum ada indicator	Belum ada indicator (dilaksanakan Inspektorat II)	Belum ada indicator (dilaksanakan Inspektorat II)	2.77	2,85

e) Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat I

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL												
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat I				80%			-	-	-	-	80%

	IK	TARGET	REALISASI
Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIPI. Pada tahun 2022, kuesioner akan disebarkan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017		80%	97,2%

Capaian Inspektorat I berdasarkan nilai yang didapatkan dari monitoring yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

Capaian Inspektorat I berdasarkan nilai

yang didapatkan dari monitoring yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal melalui e-survey didapat dari

Hasil	
Nilai SKM	**0,667**
Konversi dalam persen	**97,2**
Kesimpulan	**Sangat Baik**

Capaian 5 tahun terakhir	2018	2019	2020	2021	2022
	Belum ada indikator	Belum ada indikator	100%	90%	97,2%%

f) Capaian Indikator Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (Tabk)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL												
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)				79%			-	-	-	-	79%

	IK	TARGET	REALISASI
Pada tahun 2019, Inspektorat Jenderal membuat aplikasi Sistem Informasi Pemantauan (SINGA) untuk memonitor hasil pengawasan yang dapat digunakan oleh seluruh satker. Dalam pembuatan aplikasi ini bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian. Aplikasi ini telah disosialisaikan ke semua satker oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan akan lebih memudahkan kegiatan pengawasan, baik oleh auditor maupun auditi. Pemanfaatan aplikasi ini pada satker cakupan tugas Inspektorat I, masih pada proses awal, sehingga hasil yang diperoleh belum optimal.		77%	91%

Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)*Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan-Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data- Tahap Pelaporan menggunakan Office

Capaian 5 tahun terakhir	2018	2019	2020	2021	2022
	Belum ada indikator	Belum ada indikator	100%	91%	91%

g) Capaian IndikatorTingkat Keseuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan PKPT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN												
Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat keseuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT				80%	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I		Rp. 16.220.000,-	24,95%	24,95%	25,18%	24,92%

	IK	TARGET	REALISASI
Capaian untuk indikator ini pada tahun 2022 adalah 100%. Indikator kinerja ini muncul sejakr tahun 2018, sedangkan tahun 2017 belum dilakukan analisa pencapaian terhadap indikator ini. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan, jadwal audit dan reviu sesuai dengan jadwal pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)., sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dengan kategori sangat baik		80%	100%

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).

$x \geq 70\%$

dimana

$x = \frac{\Delta RSP}{\Delta RP} \times 100\%$

$x \geq 80\%$

dimana

$x = \frac{86}{96} \times 100\%$

$= 100\%$

x	:	batas maksimum
ΔRSP	:	**Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT**
ΔRP	:	**Jumlah rencana Pengawasan**

x	:	batas maksimum
ΔRSP	:	**95**
ΔRP	:	**95**

Capaian 5 tahun terakhir	2018	2019	2020	2021	2022
	Belum ada indikator	Belum ada indikator	82,14%	100%	100%

h) Capaian Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN												
Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I				80%	prosedur		-	100%	100%	100%	100%

	IK	TARGET	REALISASI
Capaian untuk indikator ini pada tahun 2022 adalah 100%. Indikator kinerja ini muncul sejakr tahun 2018, sedangkan tahun 2017 belum dilakukan analisa pencapaian terhadap indikator ini. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan, jadwal audit dan reviu sesuai dengan jadwal pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)., sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dengan kategori sangat baik		80%	100%

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

$x \geq 80\%$

dimana

$x = \frac{\Delta RSP}{\Delta RP} \times 100\%$

$= 100\%$

x	:	batas maksimum
ΔRSP	:	**Total Akun yang menggunakan produk dalam negeri**
ΔRP	:	**Total Realisasi**

x	:	batas maksimum
ΔRSP	:	**Rp. 1.983.753.000,-**
ΔRP	:	**Rp. 1.983.753.000,-**

Capaian 5 tahun terakhir	2018	2019	2020	2021	2022
	Belum ada indikator	Belum ada indikator	Belum ada indikator	100%	100%

i) Capaian Indikator Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN												
Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya				90%	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I		Rp. 16.300.000,-	28,25%	28,25%	28,25%	15.25%

Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	TARGET	**REALISASI**
		90%	100%

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan dengan sertifikasi JFA

$x \geq 80\%$

dimana

$$x = \frac{\Delta JFA}{\Delta JP}$$

$x \geq 90\%$

dimana

$$x = \frac{96}{96}$$

$= 100\%$

x	:	batas maksimum
ΔJFA	:	96
ΔJP	:	96

x	:	batas maksimum
ΔJFA	:	**Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat**
ΔJP	:	**Jumlah Penugasan pengawasan**

Capaian 5 tahun terakhir	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	Belum ada indikator	**Belum ada indikator**	**Belum ada indikator**	**100%**	100%

Berdasarkan matrik diatas dapat diringkas sebagai berikut

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	**Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I**	**IKU**	**1,3%**	**0,03%**	**Tercapai 100%**
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	90%	100%	Tercapai 100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	**IKU**	**92%**	**84,29%**	**Tidak Tercapai**
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I**	**IKU**	**Level 3**	**2,85**	**Tidak tercapai**
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	80%	100%	Tercapai 100%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	79%	100%	Tercapai 100%
		Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I	**IKU**	**80%**	**100%**	Tercapai 100%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	80%	89,56%	tercapai 100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	90%	100%	Tercapai 100%

Bagan 11. Realisasi Sasaran Strategis

Ringkasan Pencapaian Indikator Kinerja sampai dengan Tahun Berjalan dan Target Jangka Menengah:

Bagan 12. Realisasi Sasaran Strategis

No	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian		Tahun 2022			Target	
			2020	2021	Target	Realisasi	Capaian	2023	2024
1	2	3	4	5	4	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	0,094%	0,089%	<3%	0,005%	100%	<3%	<3%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	80%	100%	100%	95%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	88%	71%	92%	84,29%	100%	93%	94%
		Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	Belum ada indikator	Level 3	Level 3	100%	100%	Indeks	indeks
2.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	**Belum ada indikator**	100%	85%	100%	100%	85%	85%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	**Belum ada indikator**	**79%**	80%	100%	100%	85%	90%
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I	**Belum ada indikator**	75%	90%	100%	100%	90%	100%
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien\	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	92%	90%	100%	100%	95%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	92%	90%	100%	100%	92%	100%

3. Capaian Rencana Aksi 2021

Bagan 13. Capaian Rencana Aksi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN												
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I				1,4%	1. Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I 2. Reviu Laporan keuangan dan BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		Rp. 982.002.000,- Rp. 267.570.000,-	16,73% 58,49%	50,18% 38,99%	23,00% -	10,09% 2,52%
	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I				8%	1. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		Rp. 172.000.000,-	45,54%	54,55%	-	-
	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti				85%	-		-	-	-	-	-
	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU				91,5%	-		-	-	-	-	-
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I				91,5%	Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program Kegiatan Cakupan Tugas Inspektorat I		Rp. 534.432.000,-	32,67%	32,67%	32,67%	1,99%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL												
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan				75%			-	-	-	-	-
	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)				77%			-	-	-	-	-
Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I	-	-	-	100%		-	-	-	-	-	100%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN												
Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat keseuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT				80%	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I		Rp. 16.220.000,-	24,95%	24,95%	25,18%	24,92%
	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya				90%	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I		Rp. 32.200.000,-	28,25%	28,25%	28,25%	15.25%

Bagan 14. Capaian Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan yang Dilakukan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I	1,4%	Belum dapat diukur	Reviu buka blokir tingkat eselon I: BPSDMI dan Sekjen	Belum dapat diukur	Reviu L/K dan BMN Semester I, pelaksanaan Triwulan III	100%	Kementerian Perindustrian dan telah diperoleh informasi terkait hasil pemeriksaan adalah 0,089%	100%	Seluruh laporan Kementerian Perindustrian dan telah diperoleh informasi terkait hasil pemeriksaan adalah 0,089%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	8%	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III	80%	Tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan, pelaksanaan berkoordinasi dengan Set.Itjen,	85%	Pelaksanaan berkoordinasi dengan Bagian TL Set.Itjen dengan sampling sebanyak 6 Satker
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	Belum dapat diukur	Pelaksanaan oleh Klinik Konsultasi	Belum dapat diukur	Pelaksanaan oleh Klinik Konsultasi	Belum dapat diukur	Pelaksanaan oleh Klinik Konsultasi	100%	Pelaksanaan oleh Klinik Konsultasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan yang Dilakukan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU	91,5%	Belum dapat diukur	-	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III	60%	Monev SMK *link and match* dengan Industri di Jatim menghasilkan 13 saran, yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 8 saran, pelaksanaannya berkoordinasi dengan BPSDMI	7 Rekomendasi	Laporan hasil Monev yang berisi rekomendasi telah disusun
		Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti*)IKU	80%	80%	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III	100%	Reviu RKAKL Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan pada tanggal 23 - 25 September 2019, perbaikan oleh satuan kerja telah disampaikan.	100%	Reviu RKAKL Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan pada tanggal 23 - 25 September 2019, seluruh perbaikan telah disampaikan oleh satker.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan yang Dilakukan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	14%	Reviu buka blokir BPSDMI (Pusat) dan Audit 19 Satket	30%	Pada Triwulan II Audit telah dilakukan pada seluruh Satket: 30 Satker. sedangkan Reviu dan Monev akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.Kegiatan ini sesuai dengan jadwal PKPT.	90%	Sampai Triwulan III Audit telah dilaksanakan seluruhnya pada 27 Satker, BPSDMI akan dilaksanakan pada triwulan IV. Reviu LK/BMNpada 28 Satker sebanyak 2 kali. Monev sedang dalam proses pelaksanaan. .	100%	Sampai Triwulan IV telah dilakukanReviu LK/BMN pada 28 Satker sebanyak 2 kali seluruhnya telah sesuai dengan PKPT. Audit dilakukan pada 28 Satker,kegiatan ini sesuai dengan jadwal PKPT.
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	85%	Belum dapat diukur	Satker yang diaudit telah memenuhi standar mutu pengawasan	100%	Dari 30 Satker Binaan yang diaudit pada Triwulan I dan II, seluruhnya telah memenuhi standar mutu pengawasan	100%	Dari 28 Satker Binaan yang diaudit pada Triwulan I dan II, seluruhnya telah memenuhi standar mutu pengawasan	100%	Dari 28 Satker Binaan hingga Triwulan IV, seluruhnya telah emenuhi standar mutu pengawasan
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan	50%	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen	40%	Koordinasi dengan Set.Itjen	100%	Koordinasi dengan Set.Itjen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan yang Dilakukan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I									
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat keseuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	50%	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen	40%	Koordinasi dengan Set.Itjen	100%	Koordinasi dengan Set.Itjen
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	50%	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen	40%	Koordinasi dengan Set.Itjen	100%	Koordinasi dengan Set.Itjen

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu anggaran Inspektorat I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.100.753.000,- namun terjadi pemotongan anggaran pada triwulan II sehingga pagu menjadi Rp. 1.963.753.000,-. Sepanjang tahun 2022, realisasi telah mencapai Rp. 1.963.573.220,- atau 99,99%. Jika dilihat dari hal tersebut, maka capaian realisasi keuangan tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,02%.

Apabila dilihat dari pencapaian perjanjian kinerja anggaran yang telah digunakan selama tahun 2022 adalah:

Bagan 15. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	6	7
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	<3%	0,005%	100%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	100%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	92%	84,29%	100%
		Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	Level 3	100%	100%
2.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	85%	100%	100%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I	90%	100%	100%
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien\	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	100%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	100%	100%

Bagan 16. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Output	PAGU Anggaran	Triwulan ini			s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
TAK Layanan Pengawasan Internal	1.983.753.000	-	-	-	100	1.983.573.000	99.99	54,90	233.000,-	0,01

Bagan 17. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022 sesuai Aplikasi PP39

	Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan IV			s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
1	Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	968.002.000	13,00	56.531.316,80	5,84	100,00	967.826.771	99,98	-	175.229,00	0,02
2	Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	267.570.000	43,75	-	-	100,00	266.892.500	100,00	-	-	-
	Pelaksanaan Reviu Pipk Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	*32.120.000*	-	-	-	*100,00*	*32.120.000*	100,00	-	-	-
	Pelaksanaan Reviu Lk/bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	*141.480.000*	*50,00*	-	-	*100,00*	*141.480.000*	100,00	-	-	-
	Pelaksanaan Reviu Rkakl Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	*65.000.000*	*50,00*	-	-	*100,00*	*65.000.000*	100,00	-	-	-
	Pelaksanaan Reviu Rkbmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	*28.970.000*	*75,00*	-	-	*100,00*	*28.970.000*	100,00	-	-	-
3	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	172.829.000	-	99.829.000,00	57,76	100,00	172.829.000	100,00	-	-	-
4	Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	534.432.000	32,64	31.210.828,80	5,84	100,00	534.402.199	99,99	-	-	-
	Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	*254.130.000*	*30,75*	51.156.369,00	20,13	*100,00*	*254.113.252*	99,99	-	16.748,00	0,01
	Pembinaan Dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	*150.434.000*	*28,78*	13.057.671,20	8,68	*100,00*	*150.420.947*	99,99	-	13.053,00	0,01
	Sosialisasi/pendampingan Implementasi Spip Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I	*129.868.000*	*38,40*	47.349.872,80	36,46	*100,00*	*129.868.000*	100,00	-	-	-
5	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	16.220.000	50,00	-	-	100,00	16.220.000	100,00	-	-	-
6	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	24.700.000	39,27	4.552.210,00	18,43	100,00	24.672.000	99,89	-	28.000,00	0,11
	Total	1.983.753.000	35,73	192.123.356	17,56	100,00	1.983.519.970	99,98	-	203.229	0,01

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian sepanjang Tahun 2022 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan, dapat dilihat dari perbandingan denga tahun sebelummnya terdapat efisiensi pelaksanaan anggaran sebsar 0,1% dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Bagan 18. Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2022 dan 2021

No	Program/Kegiatan	Pagu			Realisasi Total			Realisasi Anggaran 2022 (%)	Efisiensi Anggaran 2022 (%)
		2021	2022	Perbedaan	2021	2022	Perbedaan		
1	Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	788.241.000	968.002.000	179.761.000	788.240.000	967.826.771	0,1	99,98	5,00
2	Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	246.202.000	267.570.000	- 21.368.000	-	266.892.500	0,1	100,00	5,00
3	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	44.000.000	172.829.000	- 128.829.000	-	172.829.000	0,1	100,00	5,00
4	Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	486.167.000	534.432.000	48.265.000	-	534.402.199	0,1	99,99	5,00
5	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	32.070.000	16.220.000	15.850.000	-	16.220.000	0,1	100,00	5,00
6.	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	16.700.000	24.700.000	- 8.000.000	-	24.672.000	0,1	99,99	5,00
	Total	1.605.000.000,-	1.983.753.000	378.753.000	**1.604.339.255**	1.983.519.970	0,1	**99,99**	5,00

BAB IV
PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat I tahun 2021 secara umum dapat dikemukakan:

a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat I tahun 2021 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.

b. Pencapaian kinerja telah memenuhi target antara lain:

Bagan 19. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	IKU	1,3%	0,03%	Tercapai 100%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%	100%	Tercapai 100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	**IKU**	92%	84,29%	Tidak Tercapai
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	**IKU**	Level 3	2,85	Tidak Tercapai
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%	100%	Tercapai 100%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	77%	100%	Tercapai 100%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I	**IKU**	75%	100%	Tercapai 100%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	**IK**	80%	100%	Tercapai excel100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	**IK**	90%	100%	Tercapai 100%

c. Penyerapan anggaran Inspektorat I, pada tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 1.983.519.970,-atau 99,99% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.983.519.970,- Dengan efisiensi sebesar Rp 233.030,- atau 0,01% dengan efiseiensi anggaran terhadap anggaran tahun 2021 sebesar 5%. Pencapaian kegiatan telah memenuhi target dan dilaksanakan sesuai perencanaan.

B. PERMASALAHAN/ KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat I tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Selama ini pengawasan yang dilaksanakan bersifat *post-audit*, sehingga upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja/obrik tidak dapat diwujudkan secara optimal.
2. Pada reviu keuangan dan reviu RKA-K/L terdapat kendala yang dialami antara lain dalam penyusunan laporan keuangan 2022 berbasis akrual masih ditemukan kelemahan dan belum seluruh SDM memahami tata cara pembuatan dan penelaahan laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu pada reviu penyusunan program dan anggaran masih ditemukan beberapa dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mempersulit proses reviu perencanaan dan program.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategis pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam membantu pencapaian visi dan misi organisasi dengan cara mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit kerja/obrik dan memberikan *early warning*, maka perlu dilakukan kegiatan pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja sebagai pelengkap kegiatan pengawasan yang telah rutin dilakukan.
2. Masih perlu dilakukannya peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu laporan keuangan berbasis akrual. Sosialisasi dan bimtek penelaahan reviu laporan keuangan berbasis akrual yang telah diikuti .oleh beberapa pegawai perlu didesiminasikan ke SDM/auditor yang lain agar kemampuan reviu laporan keuangan berbasis akrual dapat dipahami oleh seluruh auditor.
3. Kebijakan revisi dan pemotongan anggaran perlu dikoordinasikan dan diantisipasi sedini mungkin dengan merencanakan program dan kegiatan secara matang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan dan hasil evaluasi, diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT I TAHUN 2022

TUJUAN

Kode SS	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN	PAGU	REALISASI
TJ	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	3	2.85	Level	95%	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat I	3	2.85	Level	95%	1,983,753,000	1,982,959,499

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

NO.	INDIKATOR kINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN	PAGU	REALISASI
SS.1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	1.4	0.33	Persen	100%	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	11	11	Laporan	100%	968,002,000.00	952,417,167.80
							Reviu Laporan keuangan dan BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat	32	32	Laporan	100%	267,540,000.00	267,513,246.00
							Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	28	28	Laporan	100%	172,829,000.00	172,829,000.00
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8.0	0.00	Persen	100%	Prosedur	-	-	-	-	-	-
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	85.0	100.00	Persen	100%	Klinik Konsultasi	-	-	-	-	-	-
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	91.5	96.00	Persen	95%	Prosedur	-	-	-	-	-	-
SS.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat	3.0	2.77	Level	92%	Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program Kegiatan Cakupan Tugas Inspektorat I	3	3	Laporan	100%	534,462,000.00	534,408,553.80

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN	PAGU	REALISASI
SS.3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75	100	Persen	133%	Prosedur dan perencanaan	1	1	Laporan	100%	16,220,000.00	16,220,000.00
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77	100	Persen	130%	Prosedur	-	-	-	-	-	-
SS.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I	75	99.96	Persen	133%	Pengadaan Barang dan jasa lingkup Inspektorat I	-	-	-	-	-	-

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN	PAGU	REALISASI
SS.5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	80	89.59	Persen	112%	Prosedur	4	4	Laporan	100%	24,700,000.00	24,697,530.00
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90	100	Persen	111%	Prosedur	-	-	-	-	-	-